UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Asas Proporsionalitas terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penyitaan pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Rio Putra Dewanto, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad et al., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Bastara, Rudy, 2023, *Hukum Pajak di Indonesia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadisoeprapto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Kansil, C.S.T., 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Kurniawan, Dadan, 2026, Pengantar Teori Perlindungan Hukum: Analisis Teoritis dan Dinamika Keadilan, Afdan Rojabi Publisher, Karawang.

Marbun, SF. dan Moh. Mahfud, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaedah*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Mulkan, Hasanal dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Asas Proporsionalitas terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penyitaan pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Rio Putra Dewanto, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pratiwi, Cekli Setya et al., 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.

Siahaan, Marihot P., 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Tingkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S. W., 2007, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suparnyo, 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister Semarang, Semarang.

Sutedi, Adrian, 2019, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Edyanti, Yusrin dan Anna Erliyana, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)", *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Jouannaud, Victor, "The Various Manifestations of the Constitutional Principle of Proportionality in Private Law", dalam Franz Bauer dan Ben Köhler (ed.), Proportionality in Private Law, Mohr Siebeck, Tübingen, 2023.

Mujaddidi, Sipghotulloh, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 3, 2022.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Asas Proporsionalitas terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penyitaan pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Rio Putra Dewanto, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Panjaitan, Monica Christina et al., "Analisis Hukum Terhadap Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Takashi, Yutaka Arai, "Proportionality - a German Approach", *Amicus Curiae: Journal of the Institute of Advanced Legal Studies and its Society for Advanced Legal Studies*, No. 19, 1999.

Tobroni, Faiq, "Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018.

Tremblay, Luc B., "An Egalitarian Defense of Proportionality-Based Balancing", International Journal of Constitutional Law, Vol. 12, No. 4, 2014.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Emiliou, Nicholaos, 1991, The Concept of Proportionality in the Law of the European Communities with Comparative Material from Certain Member States, Ph.D. Thesis, University College London, London.

Ramadan, Wahyu Aji, 2024, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sarwono, 2005, Aspek Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Lelang Eksekusi atas Barang Miliknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Asas Proporsionalitas terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penyitaan pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Rio Putra Dewanto, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Samarinda No. 42/Pdt.G/1997/PN.Smda.), Tesis, Program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yudyaningrum, Khoirunnisa Sri, 2025, Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam Menangani Perkara Onrechtmatige Overheidsdaad dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Laporan

Aw, Irving, et al., 2025, Legislating for Fair and Effective Tax Collection, Tax Law Technical Note No. 2025/001, International Monetary Fund, Washington, DC.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025, Laporan Tahunan DJP 2024, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026, Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2025, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Internet

Asmarani, Nora Galuh Candra, "Apa Itu Fiskus?", https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/21401/apa-itu-fiskus, diakses 25 Maret 2026.

Department of Justice, "The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law", *Basic Law Bulletin*, Issue No. 15, 2013, https://www.doj.gov.hk/en/publications/pdf/basiclaw/basic15_2.pdf, diakses 2 April 2026.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Asas Proporsionalitas terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penyitaan pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Rio Putra Dewanto, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Direktorat Jenderal Pajak, "DJP Jabar III Sita 47 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp173,5 Miliar", https://www.pajak.go.id/id/berita/djp-jabar-iii-sita-47-aset-penunggak-pajak-senilai-rp1735-miliar, diakses 15 Mei 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Sekjen MK: Putusan MK Penting Diperhatikan dalam Pembentukan UU", 16 Desember 2021, https://www.mkri.id/berita/17873, diakses 8 Oktober 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (Staatsblad 1941 Nomor 44).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Asas Proporsionalitas terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penyitaan pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Rio Putra Dewanto, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tinjauan Asas Proporsionalitas terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penyitaan pada Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Rio Putra Dewanto, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 492).